

RELAWAN HUTAN MERDEKA (KONDA & WAMARGEGE)

¹Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H., ¹Dr. Latifah, S.Pt., ¹Sri Rizki Handayani, M.Pd.,
¹Sirojuddin, M.Pd., ¹Nurmas Jihad Fahrurrozi, ¹Faradila Rindiani, ¹Nurmawati, ¹Nadhira Nur
Aprilita, ¹Eltison Ambarau, ¹Amus Piter Waa

¹Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
aldilla.wiellys@gmail.com, latifah@unimudasorong.ac.id, sririzkihandayani.srh@gmail.com
sirojjuddin@unimudasorong.ac.id

Abstrak

Masyarakat Distrik Konda sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil alam, baik yang tersedia di hutan maupun yang berada dilaut. Ketergantungan akan hal tersebut yang dilakukan secara turun temurun mengakibatkan masyarakat tidak memiliki keterampilan atau keahlian lain. Apalagi saat ini dihadapkan dengan konsekuensi pencabutan izin perkebunan sawit yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan hasil analisis dan obeservasi mengenai kondisi masalah kampung, maka tim menentukan kebijakan program (solusi) pemberdayaan masyarakat dengan 1). Pelatihan pemberdayaan pengelolaan hasil alam dan limbah rumah tangga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2). Membentuk kelompokkelompok usaha kecil dan mikro. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut; 1) Menghasilkan masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai terkait program ketahanan pangan dan produk-produk seperti pembuatan ice cream, VOC, PCO, kopi manggrove, selai nanas, dan pupuk kompos. 2) Tersedianya kelompok usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM) pada kampung Konda dan Wamargege yang sebagian besar didominasi oleh ibu-ibu. 3) Tersedianya produk-produk lokal yang dihasilkan maspyarakat berbasis hasil alam baik hutan maupun laut. 4). Adanya perubahan perilaku masyarakat yang konsumtif menjadi produktif.

Kata Kunci: Masyarakat, Pembedayaan, Hutan, Konda dan Wamargege

Abstract

The people of Konda District mostly depend on natural products, both those available in the forest and those in the sea. Dependence on this which is carried out from generation to generation has resulted in the community not having other skills or expertise. Moreover, currently faced with the consequences of revocation of oil palm plantation permits which have been realized by the Regional Government of South Sorong Regency. Based on the results of the analysis and observation of the condition of the village problem, the team determines the program policy (solution) for community empowerment by 1). Training on the empowerment of natural products and household waste management as an effort to improve community welfare. 2). Forming small and micro business groups. The results of this community service activity broadly include the following components; 1) Produce people who have adequate skills and knowledge related to food security programs and products such as the manufacture of ice cream, VOC, PCO, mangrove coffee, pineapple jam, and compost. 2) There are micro, small and medium enterprises (UMKM) groups in Konda and Wamargege villages which are mostly dominated by women. 3) Availability of local products produced by the community based on natural products, both forest and sea. 4). There is a change in people's behavior from consumptive to productive.

Keywords: Community, Empowerment, Forest, Konda and Wamargege.

1. Pendahuluan

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah yang berada di Pulau Papua, dengan luas wilayah yang kurang lebih mencapai 102.946,15 km² dan habis terbagi menjadi 12 Kabupaten dan 1 Kota (BPS, 2021). Luas wilayah Provinsi Papua sendiri masih didominasi oleh hutan, baik yang dikelola oleh pemerintah, warga masyarakat, dan perusahaan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Indonesia, 1999).

Peran hutan yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Papua khususnya, bukan sesuatu persoalan yang dianggap sepele. Kebijakan perizinan mengenai pengelolaan hutan yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Daerah sudah sepatutnya dievaluasi. Menurut William N. Dunn evaluasi kebijakan publik terdiri dari enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketetapan. Apabila ke enam domain tersebut

terpenuhi, maka pelaksanaan izin yang berkaitan tentang hutan pada masa yang akan datang akan lebih baik dan membawa kemakmuran kepada masyarakat dan negara. (Pelalawan, Kasus, & Rapp, 2017)

Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik seperti sekarang, dimana otonomi daerah telah dilaksanakan secara luas ternyata masih menghadapi banyak kendala, diantaranya dana pembangunan relatif terbatas di samping kendala operasional dan fungsional lainnya, maka untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Salah satu strategi adalah mengembangkan dan menerapkan model *community development* atau model pembangunan masyarakat yang dapat diterima masyarakat luas (*acceptable*) dan dapat dilaksanakan dengan baik (*implementable*) (Mahendra, 2015).

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Yayasan EcoNusa bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan evaluasi perizinan perkebunan sawit dengan total areal seluas 576.090,84 hektar dengan sebanyak dua puluh empat (24) perusahaan. Melalui Gubernur Papua Barat dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil evaluasi telah diberikan kepada delapan pimpinan daerah yang meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk

Wondama, Teluk Bintuni Sorong, Sorong Selatan, Maybrat dan Fak-Fak, pada 25 Februari 2021 di Manokwari. Tindak lanjutnya, seluruh kepala daerah telah menyetujui penyusunan rencana aksi untuk diimplementasikan di masing-masing wilayah (Putra, 2021).

Salah satu wilayah yang dengan serius mengevaluasi kebijakan perizinan hutan adalah Kabupaten Sorong Selatan, yang pada akhirnya mencabut izin perusahaan perkebunan sawit di Distrik Konda. Secara umum Distrik Konda merupakan pemekaran dari Distrik Teminabuan pada tahun 2009 dengan total luasan mencapai 612,70 km² dan terbagi menjadi lima wilayah administratif, yaitu Kampung Bariat sebagai Ibu Kota Distrik, Konda, Wamargege, Nakna, dan Manelek.

Jarak dari masing-masing kampung ke Ibu Kota Distrik berkisar 10 km, terkecuali Kampung Manelek yang jaraknya sekitar 2 km karena lokasinya berada cukup dekat dengan pusat pemerintahan Distrik Konda. Memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, menjadikan wilayah ini berpeluang besar untuk dilakukan identifikasi lanjutan terkait komoditas lokal yang dapat di olah dan dikembangkan melalui inovasi yang mampu dijangkau oleh masyarakat setempat. Selain memiliki potensi, ketersediaan data dan

informasi menjadi sangat penting sebagai pegangan masyarakat untuk menentukan arah pembangunan kampung ke depan, terutama pasca pencabutan izin.

Dalam implementasinya, pencabutan izin perusahaan perkebunan sawit harus diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat adat untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Sampai dengan saat ini sebagian besar masyarakat adat masih belum secara optimal mampu mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Dalam menjawab persoalan tersebut masyarakat perlu diberikan sebuah pendampingan dalam bentuk pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non-material.

Sebagai suatu strategi pembangunan masyarakat, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne,

Susiladiharti, Nelson, Nugroho, & Nainggolan, 2016).

Sementara itu Ife (1995: 182 dalam buku “Community development: Creating community alternatives vision, analysis and practice”) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka (Muchtart, 2002).

2. Metode Pelaksanaan

Pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan secara penuh di lapangan walaupun saat ini masih dalam suasana pandemi. Hal ini dikarenakan di kampung Konda Dan Wamargege tidak ditemukan adanya kasus positif Covid-19. Serta resiko penularan Covid-19 sangat minim dikarenakan desa tersebut terletak cukup jauh dari keramaian dan jarang orang keluar masuk, kecuali masyarakat desa itu.



Gambar 3.1 Road Map Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Konda dan Wamargege Workshop Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan

2.1 Tahap I Sosialisasi

Pada tahap ini, tim melakukan aktivitas sosialisasi kepada beberapa pihak seperti pemerintah kampung, perkumpulan ibu-ibu PKK, jemaat gereja, dan warga masyarakat secara umum di kedua kampung Konda dan Wamargege. Sosialisasi ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tujuan tim terjun ditengah-tengah masyarakat. Kemudian visi

yang dibawa oleh tim dengan program-program yang akan diberikan kepada masyarakat secara berkala selama kurang lebih 5 minggu.

2.2 Tahap II Pelatihan Peningkatan Keterampilan Warga Masyarakat

Kegiatan pada tahap II ini, dilakukan dengan metode pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melihat potensi dan komoditi masyarakat yang ada di Konda dan Wamargege. Beberapa program atau aktivitas yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Program ketahanan pangan. 2. Program pembuatan produk berbahan dasar kelapa. 3. Program pembuatan produk berbahasan dasar mangrove. 4. Program pembuatan produk berbahan dasar limbah rumah tangga.

2.4 Tahap III Labelling dan Packaging

Produk-produk yang telah dihasilkan dari pelatihan keterampilan oleh kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM), selanjutnya diberikan labelling dan packaging. Hal ini dilakukan agar konsumen dapat mudah mengetahui tentang isi produk dan memberikan informasi yang tepat kepada konsumen hingga diperoleh fungsi produk secara maksimal.

2.3 Tahap IV Workshop Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan

Pada kegiatan akhir program ini, yakni workshop bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk dapat mendukung dan mengupaya setiap produk yang diproduksi oleh masyarakat kampung dapat segera diedarkan kepada pasar. Sebelum hal tersebut terealisasi pemerintah perlu mendampingi masyarakat untuk menjamin izin edar dan produksi. Produk yang dihasilkan perlu dikenal dan mendapatkan apresiasi pemerintah daerah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan perguruan tinggi dan pihak Yayasan EcoNusa dalam mengentaskan persoalan yang dihadapi oleh mitra yakni kampung Konda dan Wamargege.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan antusiasme masyarakat pada kedua kampung tersebut dan disesuaikan pada sasaran atau subjek yang akan diberdayakan.

Berdasarkan perencanaan dan jadwal kegiatan program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahap yang terdiri dari sosialisasi, pelatihan peningkatan keterampilan, *labeling* dan *packaging*, serta workshop.

3.1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tatap muka dan melibatkan berbagai macam unsur dimasyarakat baik pemerintah kampung, ibu PKK, dan pemuda pemudi dari kedua

kampung Konda dan Wamargege. Sosialisasi ini diharapkan dapat membangun komunikasi awal yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan selama di kampung dan program-program yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan keterampilan masyarakat.



Sosialisasi yang dijalankan juga sebagai fase awal observasi untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat tentang perkara atau kendala yang selama ini terjadi di lingkungan masyarakat. Informasi yang diperoleh oleh tim berkaitan dengan kendala masyarakat terkait bidang pertanian yakni tanaman yang selama ini dikembangkan

tidak berjalan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan aktivitas ibu-ibu di kampung yang belum memiliki keterampilan memadai dalam mengolah hasil hutan atau laut.

Berdasarkan dari informasi yang diberikan dan dari observasi tim sebelumnya. Maka program pelatihan yang akan dilakukan terhadap kampung Konda dan Wamargege adalah sebagai berikut:

1. Program ketahanan pangan.
2. Program pembuatan produk berbahan dasar kelapa.
3. Program pembuatan produk berbahan dasar nanas.
4. Program pembuatan produk berbahan dasar mangrove.
5. Program pembuatan produk berbahan dasar limbah rumah tangga.

Kelima program tersebut secara bertahap tim implementasi kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan saat ini.

3.2 Pelatihan Peningkatan Keterampilan

3.2.1 Program Ketahanan Pangan

3.2.1.1 Pembuatan Kebun Percontohan

Untuk memberdayakan pekarangan rumah dan lahan kebun yang tidak lagi dikelola oleh masyarakat, serta sebagai media utama pembuatan kebun percontohan yang akan digunakan sebagai media tanam ketahanan pangan untuk sayur-sayuran.



Masyarakat ikut dilatih dan diberdayakan dalam memanfaatkan lahan sekitar sebagai media tanam sayur-sayuran untuk meningkatkan kualitas pangan dan kesehatan.



Selain memanfaatkan lahan sekitar pekarangan rumah, masyarakat juga diajarkan membuat media tanam berbahan dasar tanah, dedak, dan tanah bekas sarang maleo.



Media tanam yang telah dibuat kemudian ditempatkan pada limbah kotak plastik wadah bekas oli yang digunakan sebagai bahan campuran bahan bakar minyak perahu. Hal tersebut dimanfaatkan karena jumlahnya sangat banyak dan mencemari lingkungan pesisir laut di kampung.

3.2.2 Program Pembuatan Produk Berbahan Dasar Kepala

3.2.2.1 Pembuatan Ice Cream

Memanfaatkan sumber daya alam berupa kelapa yang jumlahnya cukup banyak. Kelapa tersebut kemudian diolah menjadi bahan untuk pembuatan *ice cream* yang biasanya lebih populer menggunakan susu sapi. Masyarakat mulai dikenalkan dengan bahan dan alat-alat pembuatan *ice cream* yang telah tim sediakan.



Setelahnya masyarakat mencampurkan berbagai macam bahan menggunakan alat

yang telah disediakan yang berupa gula pasir, tepung tapioka, tepung hunkwee, garam halus, vanili, santan, sirup atau campuran lain (Nanas dan Kacang), dan yang terakhir adalah pasta.

Bahan tersebut kemudian dicampurkan dan dimasukkan kedalam wadah khusus yakni termos *ice cream*. Setelahnya diaduk dan putar secara berkala, agar dapat menjadi sebuah *ice* maka suhu pada adonan diturunkan secara berkala menggunakan es batu dan garam kasar yang diletakan secara menyeluruh pada wadah yang telah disediakan.



3.2.2.2 Pembuatan VCO

Virgin Coconut Oli atau yang lebih dikenal dengan VOC merupakan produk kesehatan yang berbahan dasar kelapa. Produk ini merupakan hasil dari buah kelapa yang usianya telah tua, karena bahan utamanya adalah santan yang dihasilkan dari buah kelapa. Sebagian besar masyarakat turut terlibat dalam pengumpulan buah kelapa sebagai bahan baku utama pembuatan VCO.

Kelapa yang telah dikumpulkan kemudian diparut dan setelahnya dicampurkan air dengan perbandingan 1 : 2. Kelapa yang telah dicampurkan air lalu diremas hingga mengeluarkan santan. Hal tersebut dilakukan beberapa kali hingga dirasa kepala yang diperas telah berkurang santan yang dihasilkan.

Setelah air santan dapat disimpan dalam botol atau plastik, biarkan hingga terpisah antara air, minyak dan ampasnya. Kurang lebih dapat memakan waktu 1 x 24 jam.

3.2.2.3 Pembuatan POC

Untuk memanfaatkan hasil alam serta memberdayakan limbah rumah tangga maka dibuat program pembuatan pupuk organik cair atau yang lebih dikenal dengan POC. Yang memiliki kegunaan membantu untuk proses pertumbuhan tanaman dengan memanfaatkan air kelapa dan air cucian beras sebagai media utama. Bahan yang dibutuhkan selain air kelapa dan air cucian beras adalah larutan air gula merah dan Em 11.

Semua bahan tersebut kemudian disampurkan kedalam wadah yang telah disediakan, dengan tarakan yang telah disesuaikan.





3.2.3 Program Pembuatan Produk Berbahan Dasar Nanas

3.2.3.1 Pembuatan Selai Nanas

Memaksimalkan hasil hutan yang dimiliki oleh masyarakat kampung Konda dan Wamargege yakni nanas. Tanaman tersebut merupakan tumbuhan yang ada disekitar hutan dan sering dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, sekalipun diambil buahnya hanya dikonsumsi langsung atau menjadi makanan hewan peliharaan.

Untuk meningkatkan nilai ekonomi buah nanas maka perlu diolah lebih lanjut menjadi selai nanas. Hal ini mempengaruhi nilai jual buah nanas yang biasa tidak memiliki harga sekarang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pendamping roti. Adapun proses pembuatannya sebagai berikut:

Pertama, setelah buah nanas dibersihkan lalu dipotong-potong. Selanjutnya buah nanas diparut dan dimasak dengan mencampurkan bahan-bahan yang terdiri dari gula pasir, gula merah, vanili, dan pasta nanas.

Kedua, seluruh adonan yang dicampur dimasak hingga kadar airnya mulai berkurang. Setelah dirasa cukup maka dapat didinginkan dan ditaruh pada wadah yang telah disediakan.

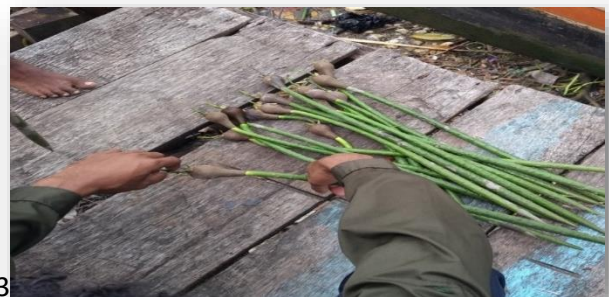


3.2.4 Program Pembuatan Produk Berbahan Dasar Mangrove

3.2.4.1 Pembuatan Kopi Mangrove

Wilayah pesisir kampung Konda dan Wamargege sangat banyak ditumbuhi oleh tanaman sejuta manfaat yakni mangrove. Berdasarkan obeservasi awal tanaman mangrove oleh masyarakat hanya dimanfaatkan kayunya saja, sebagai kayu bakar atau bahan baku membuat rumah. Namun, hingga saat ini masyarakat belum tahu manfaat lain mangrove seperti dikonsumsi menjadi minum sejenis kopi.

Pada tanaman mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai minuman sejenis kopi adalah tongke atau pangkal buahnya.



Setelah terkumpul buah tongke pada mangrove kemudian dipisahkan antara pangkal buah dan ujung buah setelah itu dibersihkan dengan mencucinya menggunakan air yang telah dicampur kapur sirih. Kemudian tongke dijemur hingga kering sesuai kondisi cuaca dapat dilakukan selama 3 hari atau lebih. Setelah itu dihalus dengan cara ditumbuh bersamaan dengan jahe untuk menambahkan aroma khas.



Setelah berubah bentuk menjadi bubuk, maka proses selanjutnya adalah melakukan penyaringan. Hal tersebut dilakukan agar memisahkan antara bubuk yang telah halus dan kasar.

Proses tersebut dilakukan hingga semua bubuk menjadi halus dan setelahnya dapat dikemas sesuai dengan selera atau berat yang diinginkan oleh masyarakat.

3.2.5 Program Pembuatan Produk Berbahan Dasar Limbah Rumah Tangga

3.2.5.1 Pembuatan Pupuk Kompos

Dalam memanfaatkan limbah rumah tangga dilingkungan sekitar dan rumput yang berada di pekarangan rumah warga dapat diolah menjadi pupuk kompos, agar lebih berguna dan tidak dibiarkan begitu saja karena pada dasarnya kompos sangat berguna bagi tanaman.

Prilaku warga selama ini terhadap limbah rumah tangga sebagian besar dibuang begitu saja atau diberikan kepada hewan peliharaan baik kucing, anjing, dan babi. Namun dibalik itu semua dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi kompos dengan bahan dan tahapan sebagai berikut.

Bahan yang perlu disediakan adalah rumput liar yang tumbuh di halaman rumah warga, limbah makanan rumah tangga, Em 11, dedak, Tanah, dan bekas sarang maleo. Kemudian cacah atau potong dengan halus

rumpun yang telah dikumpulkan setelah sebelumnya direbus agar mudah dilunakkan.



Proses akhir dari pembuatan pupuk kompos tersebut ialah dengan memberikan Em 11 secara merata, kepada campuran yang tadi telah dibuat. Kemudian bahan yang telah tercampur dipindah pada wadah yang telah disediakan untuk disimpan atau divermentasi selama kurang lebih 5 hingga 7 hari



Setelah kurang lebih memakan waktu 7 hari, pupuk kompos telah siap digunakan sebagai campuran media tanam pada kebun sayur atau bunga masyarakat.




3.3 Labeling dan Packaging

Program pelatihan yang meningkatkan keterampilan warga masyarakat memiliki luaran yang salah satunya adalah produk atau hasil karya yang berupa *ice cream*, kopi mangrove, selai nanas, VOC, POC, dan pupuk kompos. Oleh tim diberikan labeling dan packing, hal ini dilakukan dengan tujuan agar produk tersebut mudah untuk dikenali dari label atau wadahnya serta dapat memberikan informasi tentang kasiat atau manfaat produk-produk tersebut kepada masyarakat.

Adapun produk-produk yang diberikan labeling atau merek dan packaging adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Labeling dan Packaging Produk

No.	Program	Produk
1.	<i>Ice cream</i>	
2.	Kopi mangrove	
3.	Selai nanas	

4.	VOC	
5.	POC	
6.	Pupuk kompos	



Hal tersebut juga sebagai wujud pembuktian yang bahwasannya warga masyarakat dari kampung Konda dan Wamargege juga mampu menghasil produk-produk yang berasal dari komoditi hutan yang selama ini mereka manfaatkan, tinggal bagaimana pendampingan yang selama ini dilakukan tepat sasaran.

Sinergitas antara pemerintah daerah, akademisi dan industri (masyarakat produktif) dalam teorinya lebih dengan dengan model *Triple Helix*. Gagasan utamanya dalam (Diana Apriana &, 2019) adalah tentang kekuatan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

3.4 Workshop

Program pemberdayaan masyarakat melalui kuliah pengabdian masyarakat (KPM) yang ditelah dilaksanakan kurang lebih lima minggu dari bulan september dan oktober tahun 2021. Pada akhir kegiatan tim bersama yayasan EcoNusa menyelenggarakan workshop dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Workshop tersebut bertujuan menampilkan produk yang selama ini telah diproduksi oleh masyarakat yang didampingi oleh mahasiswa agar mampu diteruskan oleh pemerintah daerah dalam hal pemasaran dan perizinan.



Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, universitas menjadi elemen kunci dari sistem inovasi baik sebagai penyedia modal manusia dan pembentuk perusahaan baru (Jaelani, 2019). Oleh karena itu, pendampingan dalam hal pembangunan pemberdayaan masyarakat terutama terhadap wilayah-wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus menjadi sangat penting. Hal ini akan mempengaruhi banyak ekosistem yang secara langsung berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat secara masif.

3.5 Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Menghasilkan masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai terkait program ketahanan pangan dan produk-produk seperti pembuatan ice cream, VOC, PCO, kopi mangrove, selai nanas, dan pupuk kompos.
2. Tersedianya kelompok usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM) pada kampung

Konda dan Wamargege yang sebagian besar didominasi oleh ibu-ibu.

3. Tersedianya produk-produk lokal yang dihasilkan masyarakat berbasis hasil alam baik hutan maupun laut.
4. Adanya perubahan perilaku masyarakat yang konsumtif menjadi produktif.

4. Kesimpulan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi program ketahanan pangan dan pelatihan pembuatan produk-produk berbahan dasar komoditi lokal telah dilaksanakan dengan sangat baik. Walaupun berjalan pada masa pandemi covid-19, tidak mempengaruhi aktivitas warga secara spesifik. Hal ini dikarenakan antusiasme warga masyarakat kampung Konda dan Wamargege yang senantiasa memiliki keingintahuan yang luar biasa dalam mempelajari keterampilan yang dibagikan oleh tim.

Observasi dan pengamatan yang baik, dapat mengoptimalkan program – program yang diselenggarakan agar tepat sasaran dan menjawab persoalan masyarakat. Metode yang dilakukan dengan cara *learning by doing* (belajar sambil mengerjakan) secara langsung berinteraksi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat tepat terkait implementasi program. Dimulai dari sosialisasi, pelatihan peningkatan keterampilan, *labeling* dan *packaging*, serta *workshop* merupakan satu

kesatuan yang sesuai dan dapat diterapkan bagi wilayah lain disekitar Sorong Selatan khususnya atau Papua pada umumnya.

Sinergitas antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri (masyarakat produktif) merupakan kunci strategi pembangunan masyarakat berkelanjutan di daerah khusus seperti Papua.

5. Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendampingan yang dilakukan secara berkala, baik dengan pemerintah daerah ataupun perguruan tinggi.
2. Perlu ketersediaan pasar yang memadai guna mengakomodir produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
3. Perlu kebijakan afirmatif pemerintah daerah yang mendukung secara penuh produk-produk lokal agar mampu bersaing dengan produk dari luar wilayah khususnya Papua.

Daftar Pustaka

BPS, P. B. (2021). Provinsi Papua Barat Dalam Angka. Retrieved from <https://papuabarat.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YWFkNTEyZTNjZmQ4YjE0NzViMWFmYWJh&xzmn=aHR0cHM6Ly9wYXB1YWJhcmF0LmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIxLzAyLzI2L2FhZDUxMmUzY2Zk>

OGIxNDc1YjFhZmFiYS9wcm92aW5zaS1wYXB1YS1iYXJhdC1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIxLmh0bWw%3D&twoadfnearfeauf=MjAyMS0xMS0xNyAxMDozMT00OQ%3D%3D

Diana Apriana &, H. (2019). (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1).

Dr. Zubaedi, M.Ag., M. P. (2013). *PENGEMBANGAN MASYARAKAT WACANA DAN PRAKTIK*. JAKARTA: KENCANA. Retrieved from http://repository.iainbengkulu.ac.id/4430/1/BUKU_PENGEMBANGAN_MASYARAKAT%281%29.pdf

Eko Priyo Purnomo. (2011). *Pengembangan Hutan Berbasis Rakyat*. Yogyakarta: International Program of Governmental Studies(IGOV), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20014/Paper 17%2B - Pengembangan Hutan Berbasis Rakyat Berkelanjutan-digabungkan.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20014/Paper%2017%2B-Pengembangan%20Hutan%20Berbasis%20Rakyat%20Berkelanjutan-digabungkan.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

Indardi. (2016). *Komunikasi Pemberdayaan*

- Masyarakat*. Bandung.
- Indonesia, R. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (1999). Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>
- Jaelani, A. (2019). Triple Helix sebagai Model bagi Inovasi Pendidikan Tinggi : Analisis Logika Kelembagaan dalam Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi, *11*(1), 121–138. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i1.4980>
- Mahendra, A. (2015). PENDEKATAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT, *1*(1).
- Muchtar. (2002). MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIK, 1–10.
- Payne, M., Susiladiharti, Nelson, A., Nugroho, F., & Nainggolan, M. S. (2016). *Teori pekerjaan sosial modern*.
- Pelalawan, K., Kasus, S., & Rapp, P. T. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan, (3), 1–11.
- Putra, L. M. (2021). Mengevaluasi Izin Sawit Papua Barat. Retrieved from <https://econusa.id/id/ecoblog/mengevaluasi-izin-sawit-papua-barat/>
- Soetomo. (2010). *STRATEGI-STRATEGI-PEMBANGUNAN-MASYARAKAT-17-Mar-2021-09-57-03.pdf*. Yogyakarta.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *20*, 21–36.